

## DAFTAR ISI

BAB I .....	2
A. Alasan Pemilihan Judul .....	2
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Kerangka Dasar Teoritik .....	4
1. Teori Kepentingan Nasional (National Interest Theory) .....	5
2. Teori Dilemma Keamanan ( <i>Security Dilemma</i> ) .....	7
E. Hipotesa .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Jangkauan Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
A. Definisi Kebijakan Luar Negeri .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Definisi Nuclear non-Proliferasi Treaty (NPT) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Nuklir .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Secara Umum Terhadap Pengembangan Nuklir Negara-Negara Anggota NPT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Secara Umum Terhadap Pengembangan Nuklir Negara-Negara non-NPT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengembangan Nuklir India .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Sejarah Pengembangan Nuklir India .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan India dalam Pengembangan Nuklir India .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pengembangan Nuklir Iran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Sejarah Pengembangan Nuklir Iran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan Iran dalam Pengembangan Nuklir Iran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Nuklir India ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Nuklir Iran ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Analisa Alasan Perbedaan kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Nuklir India dan Nuklir Iran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KESIMPULAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul “*Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Nuklir India dan Iran*” dikarenakan adanya ketertarikan penulis pada sikap dan kepentingan Amerika Serikat (selanjutnya akan disebut AS/USA) terhadap pengembangan-pengembangan nuklir di negara-negara selain Eropa serta Timur Tengah, dalam hal ini kebijakan luar negeri AS terhadap negara India dan Iran.

Penulis ingin mengangkat judul perjanjian nuklir antara AS dengan India atas dasar untuk mengetahui arah kebijakan AS di Benua Asia. Diketahui sebelumnya bahwa Amerika Serikat mempunyai beberapa alasan yang mendasar untuk menetapkan India sebagai salah satu Aliansi baru di Asia. Di negara Jepang, AS menetapkan Jepang sebagai pangkalan militer di sekitar Asia Timur dan Korea Selatan menjadi negara pembendung agresivitas Korea Utara.

Selain itu tersedianya berbagai sumber dalam berbagai bentuk yang bisa menjadi acuan penulis dalam menyusun skripsi ini. Diharapkan data dan referensi yang terdapat dalam skripsi ini dapat membantu mahasiswa maupun siapa saja yang tertarik dalam isu maupun kajian yang berkaitan dengan skripsi ini.

### B. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2008, SIPRI atau *Stockholm International Peace Research* mengungkapkan data yang menyebutkan bahwa ada 9 negara pemilik senjata nuklir, yaitu AS, Inggris, Prancis, Rusia, China, India, Pakistan, Israel, dan, Korea Utara. Namun sebelumnya pada tahun 2005, hanya AS, China, Prancis, Rusia, dan Inggris yang terdaftar secara resmi oleh Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) sebagai pemilik senjata-senjata nuklir yang kemudian dikenal dengan *the nuclear club*.<sup>1</sup> Hal ini membuat empat negara-negara lain yaitu India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara serta beberapa negara-negara dan organisasi-organisasi teroris non-pemerintah lainnya yang dipercayai memiliki nuklir telah melakukan pelanggaran terhadap visi misi dan undang-undang *Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT)* dengan menjadi ‘anggota’ *the nuclear club*.

AS sendiri pada tahun 2005-2009 diperkirakan memiliki lebih dari 10.350 hulu ledak nuklir yang kemudian membuat negara adidaya ini menjadi negara ‘pemimpin’ dalam pengembangan nuklir di dunia. Hal ini membuat AS memiliki ‘tanggung jawab’ untuk mengawasi dan membatasi jumlah negara-negara yang ingin mengembangkan program senjata nuklir seperti yang dimiliki oleh *the nuclear club* yang kemudian disebut dengan *horizontal proliferation*. Sikap ‘tanggung jawab’ diperlihatkan terus menerus oleh AS. Mulai dari tahun 1961, AS tidak menandatangani beberapa hukum perang seperti, *The Declaration on the prohibition of the Use of Thermo-Nuclear Weapons* (Deklarasi Pencegahan Pemakaian Senjata Thermo-Nuklir, 1961), *The Resolution on the Non-Use of Force in International Relations and permanent Ban on the Use of Nuclear Weapons* (resolusi yang terkait tentang pelarangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional dan pelarangan selama-lamanya

---

<sup>1</sup> Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, CAPS, Yogyakarta, 2011, hlm. 240-241.

terhadap penggunaan senjata nuklir, 1972)<sup>2</sup>, dan penolakan AS terhadap *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT) pada tahun 1990an.

Pada tahun 1945 ketika hanya AS yang memiliki kapabilitas untuk menghasilkan senjata nuklir, AS tidak terlalu menaruh perhatian lebih pada isu proliferasi nuklir. Namun pada masa sekarang ini beberapa Negara telah memiliki infrastruktur serta kapabilitas untuk membangun setidaknya alat-alat nuklir yang masih mentah. Ditambah dengan terpecahnya Uni Soviet pada tahun 1990an, banyak Negara-negara bekas Uni Soviet yang memiliki tambang maupun alat-alat bekas untuk membangun reaktor nuklir. Di era globalisasi sekarang ini, ketersediaan faktor-faktor untuk mengembangkan teknologi nuklir semakin berkembang luas. Tersedianya teknologi nuklir dan para ilmuwan nuklir yang telah terlatih dengan baik mendorong semakin besarnya kesempatan Negara-negara yang tidak menandatangani NPT untuk memiliki akses ke teknologi nuklir walaupun sampai sekarang kekuatan nuklir AS masih memimpin dalam perlombaan nuklir.

Sebagai ‘pemimpin’ dalam pengembangan nuklir dunia, AS sering memperlihatkan kekuatannya dalam mengontrol persebaran pengembangan nuklir di negara-negara lain selain negara-negara anggota *the nuclear club*. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah pengawasan AS terhadap pengembangan nuklir di wilayah Timur Tengah. Sejak tahun 1933 ketika salah satu perusahaan minyak dari California mendapatkan hak eksplorasi minyak di daerah Saudi Arabia bagian timur<sup>3</sup>, terlihat bagaimana AS memiliki atensi khusus di kawasan Timur Tengah. Dimulai dengan minyak, AS melebarkan sayapnya pada perlindungan persebaran gradual negara-negara pemilik senjata nuklir. Ketika Iran memulai program nuklirnya pada tahun 1967 yang kemudian sempat terhenti dan berlanjut kembali pada tahun 1995, AS menghentikan Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) pada Iran. Pada tahun selanjutnya, AS juga mengeluarkan *Iran Sanction Act*, yang melarang semua transfer aset, barang, dan teknologi ke Iran. Hingga tahun 2010, ada beberapa ultimatum yang dikeluarkan AS kepada Iran dalam bidang ekonomi seperti CISADA (*Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act*). Upaya ini dilakukan AS untuk menghentikan pasokan produksi uranium dalam rangka pengembangan Nuklir Iran.

Selain terhadap Iran, AS juga memberikan perhatian intensif dan sikap menolak terhadap perkembangan nuklir di Rusia yang merupakan salah satu bekas Negara Uni Soviet. Sejak tahun 2014, AS menuduh Rusia melakukan pelanggaran berat terhadap INF (*Intermediate Range Nuclear Forces Treaty*). Pernyataan resmi dari AS mengatakan bahwa Rusia secara sengaja melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan penelitian dan pengembangan pada rudal jelajah darat walaupun dari pihak Rusia mengatakan bahwa hal ini hanya isu kesalahan teknik dan Rusia tidak bermaksud untuk melanggar perjanjian INF ini.<sup>4</sup> Namun hingga sekarang tidak ada perjanjian antara kedua Negara dalam hal perundingan pengembangan nuklir. Tindakan-tindakan AS dalam kapasitasnya sebagai “pemimpin” pengembangan nuklir dunia ini selalu berusaha untuk melindungi keamanan dunia dari destruksi yang tidak diinginkan hasil pengembangan senjata nuklir, terutama terhadap Negara-negara yang tidak menandatangani NPT. Sikap protektif AS diperlihatkan juga kepada negara-negara lain di benua Asia seperti Korea Utara dan India. Semenjak Korea Utara mengembangkan nuklir pada tahun 1968, AS memberikan tekanan aneksasi serta gertakan berlanjut. Negosiasi untuk program senjata Nuklir Korea Utara telah dimulai sejak tahun 1990 dibawah administrasi pemerintahan Clinton namun tidak membuahkan hasil.

Korea Utara tetap melanjutkan perkembangan nuklirnya hingga pada tahun 2015 dan memiliki beberapa program aktif dalam pengembangan nuklir di bidang biologi maupun

---

<sup>2</sup> Moh. Zainuddin, *Jejak-Jejak Nyata Amerika Mengobok-obok Wajah Dunia*, Laksana, Jogjakarta, 2011, hlm. 31.

<sup>3</sup> Sidik Jatmika, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*, Maharsa Publishing House, Yogyakarta, 2014, hlm.136.

<sup>4</sup> Tong Zhao, *The U.S.-Russia Nuclear Relationship: A New Cold War?*, Getty, 17 Juli 2015.

kimia.<sup>5</sup> Analisis AS tetap prihatin tentang kecepatan dan keberhasilan pengembangan senjata nuklir Korea Utara. DNI (*Director of National Intelligence*) menilai Korea Utara memandang kemampuan nuklirnya sebagaimana dimaksud untuk "Pencegahan, prestise internasional, dan diplomasi koersif."<sup>6</sup> Hingga sekarang Korea Utara tetap mengembangkan program nuklirnya untuk perluasan senjata dan pengembangan militer negaranya. Berbeda dengan Korea Utara, India yang mengawali uji coba nuklirnya pada 18 Mei 1974 di Pokhran dengan nama sandi *Smiling Buddha* dan kembali melakukan uji coba kedua pada tahun 1998 yang mendapat kecaman dari masyarakat Internasional pada tahun 2005 memiliki perjanjian nuklir dengan AS yang diberi nama *US-India Nuclear Deal 2008*.

Awal uji coba nuklir India terjadi pada tahun 1974 pasca pendirian NPT (*Non Proliferation Treaty*), India melakukan sebuah percobaan nuklir untuk pertama kalinya. *Smiling Buddha* (Buddha Tersenyum) adalah sebuah nama sandi yang merujuk pada uji coba ledakan nuklir pertama yang dilakukan India. Uji coba ini dilakukan pada 18 Mei 1974 di Pokhran, dan merupakan uji coba nuklir pertama yang dikonfirmasi dilakukan oleh negara di luar lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian pada 11 Mei 1998, Pemerintah India mengumumkan telah menjalani uji coba bom nuklir, merupakan pertama kalinya India melakukan uji coba senjata pemusnah massal itu sejak 1974. India melakukan tes tanpa memberi peringatan kepada masyarakat internasional.<sup>7</sup> Presiden Bush dalam hal ini mencoba mengambil langkah kepada India, dimulai pada tahun 2001 ia mencabut sanksi internasional yang dikenakan AS terhadap India. Pembicaraan dan upaya persuasi-pun terus dilakukan oleh pemerintah AS-India sehingga pada tahun 2005, melalui pembicaraan awal antara PM India Manmohan Singh dan Presiden Bush terciptalah kesepakatan yang beri nama *US-India Nuclear Deal 2008*. Hingga pada saat kepemimpinan Presiden Barack Obama, AS semakin gencar melakukan kerja sama dalam hal perkembangan program nuklir di India, dimana AS dan India menandatangani kontrak kerja sama nuklir terbesar senilai 27 miliar USD.

Kaum intelektual internasional menilai bahwa kebijakan AS di Asia khususnya di India mengindikasikan adanya kekhawatiran dari pihak AS atas kebangkitan salah satu raksasa Asia saat ini, yaitu China. Hubungan antara China dan AS dari dahulu tidak begitu dekat mengingat China termasuk negara yang memegang ideologi Komunis, bertentangan dengan ideologi AS yang lebih condong ke arah Kapitalis. Dengan adanya perjanjian ini berarti India bisa mendapatkan bantuan dari AS dalam pengembangan nuklirnya. Perjanjian ini berlanjut hingga pergantian rezim Presiden Barack Obama.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

*"Mengapa Amerika Serikat memiliki perbedaan sikap kebijakan luar negeri terhadap India dan Iran dalam pengembangan nuklirnya?"*

---

<sup>5</sup> Emma Chanlet – Avery, Mary Beth, Ian. E Rinehart, *North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation*, Congressional Research Service, January 15, 2016, hlm 1 - 27.

<sup>6</sup> Emma Chanlet – Avery, Mary Beth, Ian. E Rinehart, *North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation*, Congressional Research Service, January 15, 2016, hlm 1 - 27.

<sup>7</sup>India Uji Coba Bom Nuklir, Viva News <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/56526-india-uji-coba-bom-nuklir>, Diakses 3 April 2017.

## D. Kerangka Dasar Teoritik

Untuk menjelaskan rumusan masalah diatas, penulis akan menggunakan perspektif Realis. Pengertian perspektif yang dipakai di sini bisa juga disebut sebagai “Paradigma” yang secara sederhana diartikan sebagai aliran pemikiran yang memiliki kesamaan asumsi dasar tentang suatu bidang studi, termasuk kesepakatan tentang kerangka konseptual, petunjuk metodologis dan teknik analisis.<sup>8</sup> Dalam konvensi keilmuan, Asumsi adalah pernyataan yang kebenarannya diterima tanpa diuji demi memungkinkan penyelidikan lebih lanjut. Nilai dari suatu asumsi terletak pada kemampuan teori yang dibentuknya untuk menjelaskan untuk menjelaskan fenomena obyek penelitiannya. Dengan demikian, asumsi itu tidak bisa dinilai salah atau benar, tetapi hanya berguna atau tidak berguna. Kalau suatu teori yang didasarkan pada suatu asumsi berhasil menjelaskan suatu fenomena dengan baik, maka asumsi itu kita anggap berguna.<sup>9</sup> Perspektif realis yang penulis gunakan adalah dua konsep sebagai berikut :

### I. Teori Kepentingan Nasional (National Interest Theory)

Menurut Hans J. Morgenthau, Kepentingan Nasional (*National Interest*) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang Politik Luar Negeri dan Politik Internasional yang realis. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian negara tersebut terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.

Demikian Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Para pengkritiknya, terutama ilmuwan dari aliran saintifik, menuntut definisi operasional yang jelas tentang konsep-konsep dasar itu. Tetapi Morgenthau tetap bertahan pada pendapatnya bahwa konsep-konsep abstrak seperti kekuasaan dan kepentingan tidak dapat dan tidak boleh dikualifikasikan. Menurut Morgenthau, ”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.

Tentang kaitan antara “kepentingan nasional” dengan “kepentingan regional”, sekali lagi Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional mendahului kepentingan regional. Bagi teoritis ini, aliansi yang bermanfaat harus dilandasi oleh keuntungan dan keamanan timbal balik negara-negara yang ikut serta, bukan pada ikatan-ikatan ideologis atau moral. Suatu aliansi regional yang tidak betul-betul memenuhi kepentingan negara yang ikut serta, tidak mungkin bertahan atau tidak akan efektif dalam jangka panjang. Namun, Joseph Frankel pada tahun 1970 memiliki pendapat yang berbeda dengan Morgenthau. Kepentingan nasional tidak bisa didefinisikan secara sempit dengan cara mengabaikan kepentingan-kepentingan moral, religi, dan kepentingan kemanusiaan yang lain seperti yang dibuat oleh Morgenthau. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Nicholas Spykman bahwa kepentingan nasional juga mencakup kepentingan moral, religi, kebudayaan, dan sebagainya. Spykman juga menambahkan bahwa, untuk mengejar kepentingan-kepentingan itu tetap diperlukan *power* yang mencukupi.

---

<sup>8</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu hubungan internasional disiplin dan metodologi*, LP3ES, Jakarta. 1990, hal. 8.

<sup>9</sup> Mohtar Mas' oed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hal.17.

Berbeda dengan Paul Seabury, ia mendefinisikan konsep kepentingan nasional secara normatif dan deskriptif. Secara normatif konsep kepentingan nasional berkaitan dengan kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Cita-cita dalam hal ini tidak hanya melulu berarti mengejar *power* saja, melainkan ada juga cita-cita lainnya. Sedangkan secara deskriptif, kepentingan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Jadi, selama negara masih merupakan aktor hubungan internasional yang dominan, maka kepentingan nasional akan menjadi determinan utama yang menggerakkan negara-negara menjalankan hubungan internasional atau politik luar negeri.

Menurut Donald E. Nuckertlein, kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negaranegara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya. Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional suatu negara adalah kepentingan-kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*), kemerdekaan dan kedaulatan negara, keamanan militer, politik, dan ekonomi.<sup>10</sup> Dari keempat tokoh yang telah menjabarkan pengertian Kepentingan Nasional ini, yang paling mendekati dalam praktiknya untuk kepentingan nasional AS adalah penjabaran menurut Morgenthau dan Seabury.

Bagi AS, keamanan dalam negeri atau *Homeland Security* menjadi prioritas utama kepentingan nasional dalam pencegahan penjajahan, penyerangan, invasi atau pun penghancuran terhadap kedaulatannya dari pihak luar yang menjadi musuhnya. Hal tersebut juga ditujukan untuk memelihara kedaulatannya dari tekanan global. Dua hal yang menjadi ancaman besar bagi AS merupakan serangan terorisme yang pernah mengubah sejarah kekuatan AS di tahun 2001 dan juga kepemilikan senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh oposisinya. Kepentingan untuk menjaga keamanan dalam negerinya beserta warga negaranya dimana pun mereka berada merupakan kepentingan utama yang harus dipenuhi oleh AS dalam politik global-nya. Dalam konteks AS, kepentingan nasional yang dicapai AS dari waktu ke waktu adalah: (1) mempertahankan negara AS dan sistem konstitusionalnya; (2) perluasan eksistensi ekonomi AS dan mempromosikan produk-produknya ke luar negeri; (3) menciptakan suatu tata dunia baru atau sistem keamanan internasional yang *favorable*; (4) mempromosikan nilai-nilai demokrasi AS dan sistem pasar bebasnya.

Namun dalam periode pasca perang dingin, pemerintah AS perlu menemukan komponen-komponen baru bagi kepentingan nasionalnya. Ada tujuh aspek kepentingan nasional AS yang paling ditekankan yaitu (1) untuk mempertahankan AS, warga negaranya di dalam dan luar negeri serta para sekutunya, dari berbagai bentuk serangan langsung, (2) untuk mencegah timbulnya agresi yang dapat mengganggu perdamaian internasional, (3) untuk mempertahankan kepentingan ekonomi AS, (4) untuk menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi, (5) mencegah proliferasi senjata nuklir, (6) untuk menjaga rasa percaya dunia internasional terhadap AS serta (7) memerangi kemiskinan, kelaparan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).<sup>11</sup>

AS berasumsi bahwa peluang terjadinya konflik terbuka dengan India yang merupakan negara demokrasi akan lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya khususnya China dikarenakan India merupakan negara salah satu negara demokrasi terbesar di dunia<sup>12</sup> dan karena hal tersebut dapat diandalkan sebagai mitra yang bisa diajak kerja sama termasuk dalam bidang keamanan. Melalui kerja sama itu AS memiliki lebih banyak sekutu untuk menghadapi negara-negara lain yang juga memiliki ambisi untuk mengembangkan

---

<sup>10</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Dictionary*, Rienert and Wistone Inc USA, 1969, Terjemahan Wawan Juanda Abardin, hal. 7.

<sup>11</sup> Juwono Sudarsono (dkk), *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996. Baca juga Indraya Smita Notosusanto, *Politik global Amerika Serikat Pasca Perang Dingin*, 1996, hal. 177.

<sup>12</sup> Economist Intelligence Unit, *The Economist Intelligence Unit's Democracy Index*, <https://infographics.economist.com/2006/DemocracyIndex/>, diakses 1 Januari 2019.

nuklir. Kebijakan AS dalam menerapkan strategi kerap disebut *strategic hedging*. Melalui strategi ini, AS bermaksud untuk membuka peluang bagi negaranya dalam mempertahankan hubungan ekonomi yang menguntungkan seperti dalam salah satu aspek kepentingan nasional AS. Strategi *Hedging* ini lazimnya diterapkan AS di kawasan Asia khususnya untuk negara Jepang dan India. Dalam pandangan AS, India merupakan negara strategis untuk menerapkan strategi *hedging*. AS mengharapkan terciptanya sebuah kondisi yang membuat China dapat merevisi tatanan global dan regional yang berlaku. Sehingga dalam penerapan ini, antara Jepang, Korea Selatan, dan India akan menjadi tiga negara pendamping AS di benua Asia. Ketiga negara tersebut mempunyai *deterrence* yang tinggi, karena letak wilayah geografisnya berada di sekitar China yang akan berguna untuk meyakinkan China berpikir kembali untuk mengambil sikap positif.

## 2. Teori Dilemma Keamanan (*Security Dilemma*)

*Security dilemma* dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena aksi dan reaksi antara beberapa negara. Tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya akan berakibat atau dianggap melemahkan keamanan negara lain.<sup>13</sup> Jadi pada dasarnya, teori *security dilemma* merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kondisi psikologi para pembuat keputusan yang didasari ketidakpercayaan dan ketidaktahuan terhadap kemampuan dan atensi pihak lain (musuh). Pertama, ketidakmampuan semua pihak untuk membedakan antara mana persenjataan ofensif dengan persenjataan *defensive*. Kemajuan teknologi yang terus berubah serta kemampuan ekonomi dapat merubah kekuatan ofensif menjadi defensif secara relatif cepat oleh suatu negara yang tidak semuanya diketahui pihak lain. Kedua, ketidakmampuan mengetahui secara pasti apakah kekuatan persenjataan ofensif lebih baik dari pada kekuatan persenjataan *defensive*. Kekuatan suatu negara selalu berlaku secara kondisional dan rasional, tergantung pada situasi dan kondisi serta terhadap negara mana kekuatan tersebut dipergunakan.

Menurut Bary R Buzan seperti yang dikutip Amien Rais, definisi tentang dilemma keamanan adalah : “*what one does to enhance one’s own security causes reactions that in the end can make one less secure*”. Sedangkan menurut John H. Herz dalam Xin Benjian : “*In the anarchic international environment, national states/regions are fearful of each other because misunderstandings. Security thus become the first priority. All countries try to gain security, obtain military superiority will quickly be surpassed by other military building up efforts; absolute security is therefore impossible. So all countries are trapped in a dilemma. This kind of phenomenon is called the security dilemma.*”

Salah satu bentuk konkret dan bekerjanya *security dilemma* ini adalah perlombaan senjata. Menurut Barry Buzan, perlombaan senjata ialah dorongan militer baginegara-negara, dimana upaya mereka untuk mempertahankan diri dengan meningkatkan militernya dan menyebabkan mereka menjadi ancaman bagi Negara lain.<sup>14</sup> Titik sentral dari pengertian perlombaan senjata ini ialah terdapatnya dinamika kompetisi dan interaksi diantara dua atau lebih aktor. Selanjutnya menurut Walter S. Jones, *Security dilemma* adalah suatu keadaan ketergantungan pada persenjataan yang menjadi kebijakan suatu negara yang seolah-olah demi kepentingan pertahanan suatu negara padahal untuk mengancam negara lain. Ancaman tersebut, menyebabkan negara lain membuat kebijakan untuk meningkatkan nilai persenjataanya baik dari segi jumlah, maupun kualitasnya.

Di sini, negara-negara yang bermusuhan terkunci dalam sebuah siklus ketakutan bersama (suatu proses yang disebut pembentukan reaksi permusuhan). Dalam proses ini, setiap pihak sama-sama merasa terancam. Kesiagaan defensif salah satu pihak dianggap bukti

---

<sup>13</sup> Utari Romauli Sitorus, *Studi Hubungan Internasional*, diakses 12 Oktober 2016.

<sup>14</sup> Buzan, Barry, *Security : A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publishers Inc, USA, 1997, hlm 67.

motif ofensif oleh pihak lain, yang selanjutnya mempersenjatai diri sebagai tanggapannya. Semua pihak berusaha saling mengungguli sehingga menumbuhkan perlombaan senjata dan pasukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Perlombaan ini menyebabkan timbulnya dilema keamanan. Selain tokoh-tokoh diatas, Thomas Hobbes berpendapat bahwa teori “dilemma keamanan” dalam politik dunia adalah suatu pencapaian keamanan personal dan keamanan domestik melalui penciptaan negara selalu disertai oleh kondisi ketidakamanan nasional dan internasional yang berakar dalam anarki sistem negara. Pada dasarnya Hobbes setuju bahwa kondisi manusia adalah kondisi yang tidak aman dan berkonflik yang harus diperhatikan dan dihadapi. Namun terdapat kumpulan pengetahuan politik atau kebijaksanaan untuk menghadapi masalah keamanan dan akhirnya tidak ada pelarian akhir dari kondisi manusia ini, yang merupakan bentuk permanen kehidupan manusia.<sup>15</sup>

Hobbes menjelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut: Negara-negara berdaulat tidak akan mau menyerahkan kemerdekaannya demi terjaminnya kewanitaan global. Hal itu disebabkan keadaan alami internasional negara-negara tidak sama mengancam dan berbahayanya seperti keadaan alami aslinya: adalah lebih mudah bagi negara-negara untuk memberikan keamanan dari pada bagi pria dan wanita individu untuk melakukan hal yang sama bagi dirinya sendiri. Negara-negara dapat memobilisasi kekuatan kolektif sejumlah sejumlah besar rakyat, negara-negara dapat mempersenjatai dirinya sendiri terhadap ancaman keamanan pihak asing secara besar-besaran dan berkesinambungan. Dengan kata lain, anarki internasional berdasarkan pada negara berdaulat merupakan sistem kebebasan bagi kelompok. Tapi inti terpenting tentang keadaan alami internasional adalah bahwa hal itu merupakan kondisi dari perang aktual atau potensial; tidak akan terdapat perdamaian yang permanen atau terjamin di antara negara-negara berdaulat.<sup>16</sup>

Hobbes lebih jauh menjelaskan, bahwa negara wajib untuk membentuk sebuah entitas yang kuat dan berdaulat, sehingga dapat menjamin keamanan dari setiap warga negaranya, baik itu berupa ancaman internal maupun yang datang dari luar.<sup>17</sup> Dalam kondisi keamanan yang telah tercapai, setiap warga negara dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Namun, kondisi ini secara alamiah akan tetap menciptakan ketakutan atau perasaan terancam karena sistem internasional yang anarki. Ini yang kemudian disebut dilema keamanan (*security dilemma*) dalam politik internasional: di mana pencapaian keamanan domestik dalam penciptaan suatu negara selalu disertai oleh kondisi ketidakamanan dari aspek internal maupun eksternal yang berakar dalam sistem yang anarki.<sup>18</sup> Ini membawa pada asumsi mengenai ketidakmungkinan suatu negara terlepas dari kondisi itu. Melainkan hanya mungkin untuk membuat perjanjian-perjanjian di antara negara, melalui hukum internasional atau aturan main yang menguntungkan semua negara, agar membantu keluar dari kekhawatiran yang ada.<sup>19</sup>

Jadi pada dasarnya, teori *security dilemma* merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kondisi psikologis para pembuat keputusan yang didasari ketidakpercayaan dan ketidaktahuan terhadap kemampuan dan atensi pihak lain (musuh). Pertama, ketidakmampuan semua pihak untuk membedakan antara persenjataan ofensif dan persenjataan defensif. Kemajuan teknologi persenjataan dan kondisi yang terus berubah serta kemampuan ekonomi, misalnya, membuat suatu negara dapat merubah kekuatan defensifnya menjadi kekuatan ofensif dalam waktu yang relatif cepat. Kedua, ketidakmampuannya untuk mengetahui secara pasti apakah kekuatan persenjataan ofensif akan lebih baik dari kekuatan defensif. Kekuatan

---

<sup>15</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Ilmu Hubungan Internasional, Terj.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 97-99.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 97-99.

<sup>17</sup> *Ibid*, 96-98.

<sup>18</sup> *Ibid*, 96-97.

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 98.

<sup>18</sup> Jayshree Bajoria, and Esther Pan, *The U.S.-India Nuclear Deal*, November 5, 2010.



persenjataan suatu negara selalu berlaku secara kondisional dan relatif. Artinya, kekuatan efektif suatu persenjataan akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta terhadap negara mana kekuatan tersebut digunakan.

Hal tersebut adalah faktor pendorong dalam kesepakatan tersebut, menurut beberapa ahli. Kenaikan China di kawasan tersebut mendorong AS untuk menjalin hubungan strategis dengan India. "Amerika Serikat berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan demokrasi terbesar di dunia untuk mengimbangi China," kata CFR Ferguson. Pemerintahan Bush "berharap bisa menempel ke India karena bintang China yang sedang naik daun bisa membantu mereka menangani China," kata Sokolski.<sup>18</sup> Beberapa ahli mengatakan bahwa pertumbuhan hubungan ekonomi antara China dan India sangat penting bagi New Delhi bahwa kepentingannya di China tidak dapat diancam atau diganti oleh kesepakatan apapun dengan AS. Pakar lainnya khawatir bantuan nuklir AS ke India dapat mendorong persaingan nuklir yang berbahaya antara India dan China.

Meski India memiliki minat kuat dalam membangun hubungan ekonomi dengan China, New Delhi masih mewaspadaikan kenaikan militer China di kawasan tersebut. Kaum intelektual internasional menilai bahwa kebijakan AS di Asia khususnya di India mengindikasikan adanya kekhawatiran dari pihak AS atas kebangkitan salah satu raksasa Asia saat ini, yaitu Cina. Hubungan antara Cina dan Amerika dari dahulu tidak begitu dekat mengingat Cina termasuk negara memegang ideologi Komunis. Selain kebangkitan Cina, bagi Amerika Serikat nuklir Iran dianggap lebih berbahaya di banding Korea Utara dan Pakistan yang dianggap *de facto* negara pemilik senjata nuklir, walaupun tidak diakui dan tidak diumumkan secara resmi.

#### **E. Hipotesa**

Penulis menarik kesimpulan awal bahwa Amerika Serikat memiliki perbedaan sikap kebijakan luar negeri terhadap India dan Iran dalam pengembangan nuklirnya karena Amerika Serikat ingin memanfaatkan India untuk membendung pengaruh dari pertumbuhan militer dan potensi ancaman nuklir di Negara-negara sekitar India seperti Pakistan dengan menjadikan India "teman" dan untuk mendapatkan dukungan penuh pemberian sanksi Dewan Keamanan PBB kepada Iran dalam pengembangan nuklir yang tertutup.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Amerika Serikat memiliki perbedaan sikap terhadap perkembangan nuklir India.
2. Untuk memenuhi syarat akhir di dalam menempuh pendidikan jenjang S-1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis meneliti mengapa Amerika Serikat memiliki perbedaan kebijakan luar negeri terhadap perkembangan nuklir India dengan fokus perjanjian pada tahun 2005. Selain itu penulis juga meneliti sikap-sikap Amerika Serikat terhadap Negara-negara non NPT yang lain terutama Cina dan Iran agar bisa dijadikan bahan perbandingan dan mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang ada.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengadakan penilitian kepustakaan terhadap buku, literatur, makalah, jurnal ilmiah, majalah atau Koran, dan laporan tahunan dari yang diterbitkan oleh instansi atau badan pemerintah yang mengkaji masalah internasional dan sumber yang dianggap resmi, kemudian dianalisa, bagaimana tiap variabel berhubungan antara satu sama lain.

## I. Sistematika Penelitian

Sebagai sebuah penulisan deskriptif, penulis membuat sub-sub pokok yang dapat menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok permasalahan diatas.

Pada BAB I :

- A. Alasan Pemelihan Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Kerangka Dasar Teoritik
  - 1. Konsep Kepentingan Nasional (National Interest Theory)
  - 2. Konsep Dilemman Keamanan (Security Dilemma)
- E. Hipotesa
- F. Tujuan Penelitian
- G. Jangkauan Penelitian
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penelitian

BAB II :

- A. Definisi Kebijakan Luar Negeri
- B. Definisi *Non-Proliferasi Treaty* (NPT)
- C. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Nuklir
  - 1. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Secara Umum Terhadap Pengembangan Nuklir Negara-Negara Anggota NPT
  - 2. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Secara Umum Terhadap Pengembangan Nuklir Negara-Negara non NPT

BAB III :

- A. Pengembangan Nuklir India
  - 1. Sejarah Pengembangan Nuklir India
  - 2. Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan India dalam Pengembangan Nuklir India
- B. Pengembangan Nuklir Iran
  - 1. Sejarah Pengembangan Nuklir Iran

2. Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan Iran dalam Pengembangan Nuklir Iran

C. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Nuklir India

BAB IV :

A. Analisa Alasan Perbedaan kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Nuklir India dan Iran

BAB V :

A. Kesimpulan

